

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal

Lucky Febriansyah Putra¹, Novi Mubiarto², Mellya Embun Baining³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi,
febriansyahluck8@gmail.com;

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi,
novimubyarto@uinjambi.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi,
mellyembun.baining@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Economic Growth, Regional Original Income and General Allocation Funds on Capital Expenditure Budget Allocation in Merangin Regency for the period 2011 - 2021. The sample used in this study consisted of 6 OPDs in Merangin Regency which were sourced from the Budget Realization Report. Regional Revenue and Expenditure (APBD) from 2011-2021 obtained from the Central Bureau of Statistics and DJPK. The type of data used in this study is secondary data with the analytical tool used is multiple regression test. The results of this study Simultaneously show that Economic Growth, Original Income Regions and General Allocation Funds have a positive and significant effect on capital expenditures. And partially shows that the Economic Growth of Regional Original Income, the General Allocation Fund has a positive and significant effect on Capital Expenditures

Keywords: *Economic Growth, Regional Original Income, General Allocation Fund and Capital Expenditure*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten Merangin periode 2011 - 2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 6 OPD yang terdapat di Kabupaten Merangin yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2011-2021 diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan DJPK. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat analisis yang digunakan adalah uji regresi berganda. Hasil penelitian ini secara Simultan menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dan secara parsial menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

1. Pendahuluan

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan kepentingan sosial daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, mengelola sumber daya daerah secara efisien dan efektif, serta meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor (UU). UU No. 22 dan No. 22 Tahun 1999. Keppres No. 25 Tahun 1999 menetapkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya, kebijakan ini diperbaharui dengan terbitnya UU No. 1. Keputusan No. 32 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Keputusan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber daya keuangannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang sedang berkembang di daerah.

Kemajuan daerah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan jumlah pendapatan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan pada suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah pendapatan daerah, besarnya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah Daerah harusnya mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan secara simultan maupun secara parsial.

Pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pemerataan. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana kompensasi, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

Secara umum, dana kompensasi merupakan bagian utama dari pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian dana kompensasi adalah untuk menjembatani kesenjangan fiskal antara pemerintah

pusat dan daerah, kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah, memperbaiki sistem perpajakan, dan memperbaiki masalah inefisiensi fiskal.

Faktor lain yang mempengaruhi belanja modal yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensi akibat penyerahan kewenangan Peralihan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menyebabkan perlunya perimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga terjadi transfer anggaran nasional yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. pemerintah bebas menggunakan dana tersebut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi belanja modal adalah pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syukri dan Hinaya (2019), Bambang Supriyatno (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem Dassy Dyah Pratama (2018) menunjukkan hasil Pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap belanja modal.

Faktor yang mempengaruhi belanja modal selanjutnya adalah pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syukri dan Hinaya (2019), Bambang Supriyatno (2015), Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem Dassy Dyah Pratama (2018) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap belanja modal adalah dana alokasi umum (DAU). Pada penelitian Muhammad Syukri dan Hinaya (2019), Bambang Supriyatno (2015) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal, namun penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem Dassy Dyah Pratama (2018) menyatakan DAU tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap belanja modal.

2. Kajian Literatur

2.1 Stewardship Theory

Grand theory dalam Penelitian ini adalah menggunakan Stewardship Theory, Teori Stewardship menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh

tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Menurut Etty Murwaningsari, Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat Antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori Stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan manusia merupakan individu yang berintegrasi.

Pemerintah selaku stewardship dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin Antara pemerintah (stewardship) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik). Sehingga dapat diterapkan dalam model khusus organisasi sektor publik dengan teori stewardship. Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

2.2 Stakeholder Theory

Selain teori stewardship, teori lain yang mendasarkan penelitian ini adalah teori Stakeholder, istilah stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Standford Research Institute (RSI) pada tahun 1963 (Freeman, 1984). Freeman (1984) mendefinisikan bahwa stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Stakeholder teori merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi.

Stakeholder ialah suatu individu, kelompok atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim terhadap sumber daya atau hasil dari organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu. Keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta ialah sejauh mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan stakeholder utama (masyarakat sebagai stakeholder utama). Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku stakeholder.

2.3 Anggaran Daerah Sektor Publik

Anggaran daerah adalah alat yang berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan menitikberatkan pada potensi dan sumber kekayaan daerah. Glenn A Welsch mendefinisikan penganggaran sebagai "perencanaan dan pengendalian laba dapat didefinisikan secara luas sebagai sistem dan metode formal untuk memenuhi tanggung jawab perencanaan, koordinasi, dan pengendalian manajemen. Hukum Syariah dalam penganggaran menjadi sangat penting dalam memprediksi kebocoran. Dalam konteks ini, keberadaan anggaran sangat mendesak, karena tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran harus terikat oleh hukum agar dapat menanggung akibatnya di pengadilan jika terjadi pelanggaran.

2.4 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Proses penganggaran dalam performance budgeting dimulai dengan satuan kerja pemerintah daerah mengesahkan dokumen usulan anggaran yang disebut dengan rencana anggaran satuan kerja (RASK). Kemudian, tim anggaran eksekutif mengkaji RASK untuk menilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana) untuk diajukan ke legislatif RAPBD. RAPBD kemudian dipelajari oleh Panitia Anggaran Legislatif dan reaksi seluruh panitia dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Proses penganggaran kinerja dimulai dengan diadopsinya dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) oleh satuan kerja pemerintah daerah. Tim anggaran eksekutif kemudian meninjau RASK untuk menilai kelayakannya dimasukkan dalam RAPBD (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana) untuk dipresentasikan ke legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan ditanggapi oleh semua panitia dan fraksi dalam pembahasan anggaran (Riska Korompot Agus, 2014).

2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono (1985) percaya bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses jangka panjang dari peningkatan output per kapita. Proses ditekankan di sini karena mengandung unsur dinamis. Para ahli teori ekonomi pembangunan kontemporer masih menyempurnakan makna, sifat dan konsep pertumbuhan

ekonomi. Para ahli teori ini menunjukkan bahwa ukuran pertumbuhan ekonomi tidak hanya PDB dan pertumbuhan PDB, tetapi juga bobot tak berwujud dari kenikmatan, kepuasan, kebahagiaan, keamanan, dan kedamaian yang umumnya dirasakan oleh masyarakat.

PDB adalah total output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Metode perhitungan dalam prakteknya antara lain membagi perekonomian ke dalam sektor-sektor produksi (sumber industri). Output total setiap sektor adalah output total seluruh perekonomian. Akan tetapi, produksi suatu sektor ekonomi dapat berasal dari produksi sektor-sektor lainnya. Atau bisa dijadikan masukan bagi sektor ekonomi lainnya.

2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2007) PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi.

Fitur sebenarnya dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah tingkat tinggi pemerintah pusat kontrol atas proses pembangunan daerah. Dibandingkan dengan jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat, PAD (pendapat) menyumbang sebagian kecil dari total pendapatan daerah, yang jelas. Indikator desentralisasi fiskal adalah hubungan antara PAD dan pendapatan daerah keseluruhan. PAD meliputi pajak daerah, pajak daerah, pendapatan jasa, pendapatan bersih bisnis regional (BUMD) dan pendapatan lainnya.

2.7 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Bastian, Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari dana alokasi umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.

2.8 Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja investasi permanen, aset tetap, dan aset berwujud lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelompokan belanja modal meliputi pengeluaran untuk memperoleh investasi permanen dan pengeluaran untuk pembelian aset tetap.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran kas daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah otonom itu sendiri.

a. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja modal. Secara umum, jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, pemerintah daerah akan terus meningkatkan alokasi belanja modal dari tahun ke tahun untuk melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana, tetapi mereka akan melakukan penyesuaian sesuai dengan situasi dan keadaan selama periode anggaran tahunan.

b. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Anggaran Belanja Modal

Hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks PAD dapat berasal dari kapasitas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja modal, yaitu menyediakan fasilitas yang memadai, memberikan pelayanan publik yang baik dan meningkatkan kesejahteraan. Lihat infrastruktur yang dibiayai oleh belanja modal yang dianggarkan setiap tahun. Karena belanja modal sendiri merupakan sumber pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap Pemangku kepentingan biasanya membuat analisis dalam pengambilan keputusan.

c. Hubungan Dana Alokasi Umum Dengan Belanja Modal

Hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks DAU dapat dilihat dari bagaimana pemerintah memberikan

pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui alokasi belanja modal. Sama halnya dengan PAD, dalam konteks pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, DAU merupakan sumber pembiayaan belanja modal untuk penyediaan sarana dan prasarana. Bedanya, jika PAD berasal dari dana masyarakat dan DAU berasal dari transfer APBN, maka transfer tersebut didistribusikan antar daerah dengan tujuan pemerataan keuangan guna mendanai kebutuhan belanjanya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Provinsi Melangin dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 yang dapat diakses melalui website www.djpk.kemenkeu.gp.id. Selama masa penelitian ini, terdapat 6 OPD yang menjadi populasi penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 (Enam) Organisasi Perangkat Daerah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek dengan sumber data primer. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah metode artikel dan buku- buku yang berhubungan dengan penelitian ini dan pengambilan data berupa laporan keuangan tahunan Kabupaten Melangin. Peneliti mengumpulkan data dari rumusan masalah, penelitian sebelumnya, perhitungan data dan analisisnya.

3.4 Metode Analisis Data

Model dan teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linear berganda. Untuk keabsahan hasil analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji kualitas instrumen pengamatan, uji normalitas data dan uji asumsi klasik. Model analisa regresi linear berganda dalam penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

b_0 = Konstansta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi

X_1 = Pertumbuhan Ekonomi

X_2 = Pendapatan Asli Daerah

X_3 = Dana Alokasi Umum

e = Eror

4. Hasil dan Pembahasan

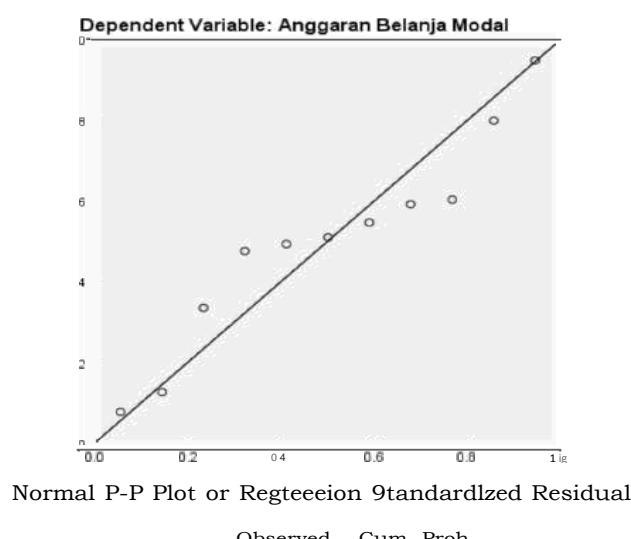
4.1 Hasil

4.1.1 Uji Asumsi klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi linear berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi: Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik dimaksudkan agar data yang diteliti tidak bias. Uji asumsi klasik untuk menguji, apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak diuji atau tidak. Uji asumsi klasik dapat dijabarkan sebagai berikut :

4.1.1.1 Uji Normalitas

Gambar 1. Grafik Normal Probability Plot Hasil Uji Normalitas



Melihat gambar grafik normal probability di atas, kita dapat melihat bahwa distribusi titik-titik pada grafik di atas mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel dan item pertanyaan berdistribusi normal.

4.1.1.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pertumbuhan Ekonomi	.531	1.882
PAD	.238	4.200
DAU	.246	4.081

Sumber: Data diolah IBM SPSS 22, 2022

Dari tabel coefficients di atas, dapat diketahui bahwa nilai tolerance dan nilai VIF dari tiga variabel independen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (XI) dengan nilai Tolerance (0.531) < 10. PAD (X2) dengan nilai Tolerance (0.238) > (0,1) dan nilai VIF (4.200) < 10. DAU (X3) dengan nilai Tolerance (0.246) > (0,1) dan nilai VIF (4.061) < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak te adi multikolinieritas, karena nilai Tolerance tiap variabel independen berada di atas nilai 0,1 dan nilai VIF tiap variabel independen di bawah angka 10.

4.1.1.3 Uji Autokorelasi

Tabel 2. Hasil Uji Runs Test
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value"	1439961252.07834
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	6
Total Cases	11
Number of Runs	7
Z	0.029

Asymp. Sig. (2-tailed)	.977
a. Median	

Pada output Runs Test di atas terlihat bahwa nilai test 1,439,9G1,252.07 sedangkan nilai probabilitasnya adalah 0.977. Unnik menyimpulkan apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak maka nilai test dibandingkan dengan nilai tabel atau nilai probabilitas dibandingkan dengan nilai alphanya. Berdasarkan output tersebut diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.977 lebih besar dari pada 0,05, sehingga hipotesis nihil menyatakan nilai residual menyebar secara acak diteki iona. Dengan demikian maka tidak terjadi autokorelasi.

4.1.2 Uji Hipotesis

4.1.2.1 Koefisien Determinasi

Tabel 3. Koefisien Determinasi
Model Summary[^]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.823	.678	.540	6284735518 6.2 23	1.941

Dari tabel di atas, untuk nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,540 atau 54% yang artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU memiliki pengaruh sebesar 54% terhadap variabel Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin dan untuk sisanya sebesar 46% dipengaruhi oleh faktor lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin.

4.1.2.2 Uji T (Uji Parsial)

Tabel 4. Hasil Uji t (t test)

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Fifg
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	379076777219. 065	16796138g302.859			2.257	.059

Pertumbuhan Ekonomi	30106465422.969	15322821244.002	-.578	1.985	.009
PAD	1.558	1.545	.443	2.008	.047
DAU	.067	.204	.142	.328	.053

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Anggaran Belanja Modal

Dari tabel 4 dapat dilihat t hitung variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1.965 dengan tingkat signifikansi 0.009. Kemudian dilihat pada tabel, nilai pertemuan antara ($df=n-k-1$) atau ($11-3-1= 7$) dengan pada t tabel pada taraf signifikansi 0,05 adalah sebesar 1.89458. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dibandingkan dengan t tabel ($1.965 > 1.89458$) dan taraf signifikansi ($0.009 < 0,05$) sehingga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin. Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima dilihat di t hitung sebesar 1.965 dengan tingkat signifikansi 0.009 sementara t tabel sebesar 1.89458 dan taraf signifikansi 0.009 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis diterima, atau Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal

Dari tabel 4 dapat dilihat t hitung sebesar 2.008 dengan tingkat signifikansi 0.047. Kemudian dilihat pada tabel t tabel, nilai pertemuan antara ($df=n-k-1$) atau ($11-3-1= 7$) dengan taraf signifikansi 0,05, pada t tabel adalah sebesar 1.89458. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dibandingkan dengan t tabel ($2.008 > 1.89458$) dan taraf signifikansi ($0.047 < 0,05$) sehingga menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin. Untuk mengetahui apakah Hipotesis diterima atau ditolak, dapat dilihat pada t hitung sebesar 2.008 sementara t tabel sebesar 1.89458 dan taraf signifikansi 0.047 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis diterima, atau Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin

Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal

Dari tabel 4 dapat dilihat t hitung sebesar 0.328 dengan tingkat signifikansi 0.053 Kemudian dilihat pada t tabel, nilai pertemuan antara ($df=n-k-1$) atau ($11-3-1= 7$) dengan taraf signifikansi 0,05, pada t tabel adalah sebesar 1.89458. Hal ini

menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil dibandingkan dengan t tabel ($0.328 < 1.89458$) dan taraf signifikansi ($0.053 > 0,05$) sehingga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin. Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, dapat dilihat pada t hitung sebesar 0.328 sementara t tabel sebesar 1.89458 dan taraf signifikansi 0.053 lebih besar dari 0,05. Ini berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis ditolak, atau Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin.

4.1.2.3 Uji F (Uji Simultan)

Tabel 5. Hasil Uji F
ANOVA

Mode	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	5817621882267676 0000000.000	3	1939207294089225 6000000.000	4.910	.027
Residual	2764853037722322 5000000.000	7	3949790052903318 000000.000		
Total	8582474919999999 0000000.000	10			

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU terhadap Anggaran Belanja Modal

Dari tabel 5 dapat dilihat F hitung sebesar 4.910 dengan tingkat signifikansi 0,027. Kemudian dilihat pada tabel F tabel, nilai pertemuan antara ($F_{tabel} = k; n - k$) atau ($F_{tabel} = 3; 1.1-3$) yaitu (3 ; 8) dengan nilai signifikansi 0,05, pada F tabel adalah sebesar 3.59.

Hal ini menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel ($4.910 > 3.59$) dan taraf signifikansi ($0,027 < 0,05$) sehingga menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin. Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak maka dapat dilihat pada F hitung dengan F tabel. Untuk F hitung sebesar 4.910 sementara F tabel sebesar 3.59 dan taraf signifikansi 0,027 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti F hitung lebih besar dari F tabel

dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis diterima.

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi berganda dapat dinyatakan dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 379,076,777,219.065 + 30,106,564,422.969 X_1 + 1.558 X_2 + 0.067 X_3 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan adanya nilai koefisien X_1 bernilai positif sebesar 30,106,564,422.969 yang berarti apabila nilai Pertumbuhan Ekonomi meningkat satu poin maka Anggaran Belanja Modal akan meningkat sebesar 0.306 poin, dengan asumsi X_2 dan X_3 tetap. Koefisien X_2 bernilai positif sebesar 30,106,564,422.969 yang berarti apabila nilai PAD naik satu poin maka Anggaran Belanja Modal akan meningkat sebesar 0.598 point, dengan asumsi X_1 dan X_3 tetap. Koefisien X_3 bernilai positif sebesar 1.558 yang berarti apabila nilai DAU naik satu poin maka Anggaran Belanja Modal akan meningkat sebesar 0.067 point, dengan asumsi X_1 dan X_2 tetap.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin.

Uji t yang dilakukan ini menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil dibandingkan dengan t tabel ($1.965 < 1.89458$) dan taraf signifikansi ($0,009 < 0,05$) sehingga menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin 2011-2021.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Mundiroh dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah.” Dari penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Namun penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Heldy Ismail. Dari penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan meningkatkan belanja modal sebesar 6,976% di Kabupaten Gorontalo.

4.2.2 Pengaruh PAD Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin.

Uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil dibandingkan dengan t tabel ($0.328 < 1.89458$) dan taraf signifikansi ($0,053 < 0,05$) sehingga menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin tahun 2011-2021.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Mundiroh dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah.” Dari penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Namun penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Heldy Ismail. Dari penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dimana nilainya cenderung kearah negatif yakni setiap peningkatan penerimaan PAD sebesar 1% justru malah mengurangi belanja modal sebesar -0,207% di Kabupaten Gorontalo.

4.2.3 Pengaruh DAU Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin.

Uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil dibandingkan dengan t tabel ($0.328 < 1.89458$) dan taraf signifikansi ($0,053 < 0,05$) sehingga menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin tahun 2011-2021.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Mundiroh dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah.” Dari penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Namun penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Heldy Ismail. Dari penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa dana alokasi umum tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal namun DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal karena jumlah DAU yang diterima tetap mampu meningkatkan belanja modal di Kabupaten Gorontalo walaupun peningkatannya relatif kecil di Kabupaten Gorontalo.

4.2.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Simultan

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tersebut. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber APBN untuk mendanai desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasianya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatkan untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah. Hal ini

terlihat dari nilai F hitung masing masing variabel lebih besar dari Ftabel. Dan nilai Adjusted R Square pada penelitian ini sebesar 0,540 yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap anggaran belanja modal daerah sebesar 54%. Hal ini berarti ada variabel lain yang belum ada di dalam model yang berkemungkinan bisa mempengaruhi variabel dependennya. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, dkk yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin pada tahun 2011-2021, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin tahun 2011-2021. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin tahun 2011-2021.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin tahun 2011-2021. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel PAD lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin tahun 2011-2021. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel DAU lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin.
4. Variabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin tahun 2011-2021. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk koefisien determinasi (R²) mencapai 0,53 atau 53%. Ini artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi (X₁),

PAD (X2) dan DAU (X3) berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Merangin (Y). Dengan tingkat pengaruh sebesar 53%.

Referensi

- Agus, Riska Korompot. 2014. "Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014." *Analisis Penyusunan Anggaran*.
- Arrahman, A., & Yanti, I. (2022). Halal Industry in Javanese Culture; Yogyakarta Regional Government Policy in obtaining its economic values. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 16(1), 151–174. <https://doi.org/10.18326/infs13.v16i1.151-174>
- Ayem, Sri dan Dessy Dyah Pratama. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol.2 No.2.
- Bastian, Indra. 2003. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Pusat Pengembangan Akuntansi. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Boediono. (1985). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE: Yogyakarta.
- Fahrurunisah, Noora, dan Achmad Badjuri. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2015),." *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*
- Freeman, E. (1984). *Stakeholder management: Framework and philosophy*. Mansfield: Pitman.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Heldy Ismail.2013. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada kabupaten gorontalo.Universitas Negeri Gorontalo.Gorontalo
- Mayasari, Luh Putu Rani dkk. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesh Volume: 2 No.1 Tahun 2014*.
- Mundiroh, Siti. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal daerah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*. Vol 2, No 1.
- Murwaningsari,Etty.2009. "Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Kontinum." Universitas Trisakti.

- Nengsih, T. A. (2021). Jambi Province Economic Growth using Principal Component Regression in Islamic Economic Perspective. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 36(01). <http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/Kontekstualita%0A>.
- Nengsih, T. A., Abduh, M., Ladini, U., & Mubarak, F. (2023). The Impact of Islamic Financial Development, GDP, and Population on Environmental Quality in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(1), 7–13. <https://doi.org/10.32479/ijep.13727>
- Suprayitno, Bambang. 2015. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa.” *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*
- Sholihin, M., Shalihin, N., & Addiarrahman. (2023). the Scale of Muslims' Consumption Intelligence: a Maqāṣid Insight. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(2), 98–118. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.544>
- Subekti, A., Tahir, M., Mursyid, & Nazori, M. (2022). the Effect of Investment, Government Expenditure, and Zakat on Job Opportunity With Economic Growth As Intervening Variables. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(3), 102–112. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.3.9>
- Syukri, Muhammad, dan Hinayah. 2019. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan.” *Jurnal Ekonomi*.
- Wati, Masayu Rahma, dan Catur Martian Fajar. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung.” *Jurnal Kajian Akuntansi*
- Welsch, Glenn, 2000. Budgetting, Perencanaan dan Pengendalian Laba, Edisi ke Lima, Cetakan ke Dua, Terjemahan Siddiq, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.